TINJAUAN FILOSOFIS DAN EMPIRIS EKONOMI KELEMBAGAAN:
KAITAN DENGAN MASYARAKAT PESISIR

DODI DERMAWAN

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jl. Politeknik Senggarang , Tanjungpinang.
dodydermawan@gmail.com

ABSTRAK

Pemikiran ekonomi neoklasik yang menggunakan paradigm positivism belum mampu memberikan pemerataan kesejahteraan pada berbagai sector dimasyarakat. Untuk itu diperlukan pemikiran ekonomi kelembagaan yang melandaskan paradigma yang holistik, orientasi kesejahteraan manusia, multidisiplin, dan mengakomodir budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Pemikiran ekonomi kelembagaan sebagai alternatif baik ditinjau dari filosofis dan empiris pada kasus masyarakat pesisir. Berbagai kajian literature mengatakan ekonomi kelembagaan sangat sesuai untuk dikembangkan pada masyarakat pesisir yang masih kuat dengan budaya dan kearifan local, sebagai penopang tegaknya interaksi yang harmonis, dinamis, agar tercapai tujuan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Neoclassical economic thought using positivism paradigm has not been able to equalization income distribution in various community sectors. Therefore, need institutional economic thought which is based on holistic paradigm, human welfare orientation, multidisciplinary, and accommodate local culture and local wisdom. Institutional economic thought as an alternative is reviewed from philosophical and empirical in the case of coastal communities. Many literature studies remark institutional economics is very suitable to be developed in coastal communities that are still strong with local culture and wisdom, as a supporter of the establishment of a harmonious, dynamic interaction, in order to achieve a just and sustainable economic goals.

Keyword: Filosofis dan empiris, ekonomi kelembagaan, masyarakat pesisir.

Pendahuluan

Kegagalan ekonomi klasik yang meletakkan pondasi pada *laize faire* menyebabkan jurang disparitas pendapatan masyarakat menjadi sangat tinggi, sehingga menimbulkan kasta-kasta dan kelas-kelas didalam social. Kelas-kelas ini menyebabkan saling eksploitasi diantara satu sama lain. Kelas pemilik modal (pengusaha) sering disebut dengan kelas santai (*leisure class*) memiliki jumlah yang lebih sedikit dari kelas pekerja mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih besar dari kelas pekerja yang jumlahnya lebih banyak akan tetapi kurang mendapatkan kesejahteraan dari aktivitas ekonomi.

Begitu juga dengan teori-teori dari aliran klasik yang secara filosofis lebih menekankan dengan pendekatan kuantitatif dalam melakukan analisis. Teori-teori klasik yang bertumpu pada aliran/paham positivism, yang melihat suatu realita hanya dari sudut permodelan yang disederhanakan dan bertumpu pada analisis kuantitatif tanpa mengedepankan sisi humanism yang komprehesif dalam melakukan analisis. pengambilan kebijakan dalam aliran ekonomi neoklasik ini lebih mengandalkan kepada kebebasan ekonomi dan terlalu percaya kepada superioritas mekanisme pasar yang pada kenyataannya justru menimbulkan bahaya eksploitasi.

Persoalan ini menimbulkan kritikan dari seorang pemikir ekonomi yang bernama Torsten Bunde Veblen (1899). Veblen melihat kondisi ini sebagai barbarisme dalam kehidupan bermasyarakat dan mengkritik teori klasik yang terlalu menyederhanakan fenomena ekonomi dan mengabaikan aspek non ekonomi seperti motivasi social dan kejiwaan. Menurut Veblen pengaruh keadaan & lingkungan sangat besar terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Veblen menilai teori ekonomi klasik merupakan pemikiran teologi karena akhir cerita telah ditentukan dari awal. Misalnya, asumsi keseimbangan jangka panjang yang menurutnya tidak pernah dibuktikan, tetapi telah ditentukan walaupun ceritanya belum dimulai. Ilmu ekonomi menurutnya bukan hanya mempelajari tingkat harga, alokasi sumber-sumber tetapi justru mempelajari factor-faktor yang dianggap tetap (given). (Santosa, 2008)

Veblen menilai bahwa para pengusaha *absentee ownership* yang bisa memperoleh keuntungan besar dengan cara *kongkalikong* tersebut sangat berpotensi melahirkan golongan *leisure class*. Secara psikologis orang yang bisa memperoleh sesuatu tanpa kerja

keras biasanya cenderung tidak menghargai sesuatu yang diperolehnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau perilaku konsumsinya akan bersifat *conspicuous consumption*. Perilaku mereka yang suka pamer tersebut kadangkala sangat norak, sebab suka membeli sesuatu yang tidak dimanfaatkan dengan sewajarnya. Hal ini berbeda dengan perilaku konsumsi pengusaha murni yang serius dan bekerja keras dalam berusaha. Karena keberhasilan diperoleh melalui kerja keras mereka akan lebih perhitungan dalam mengonsumsi barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya.(Deliarnov, 2016).

Masalah- masalah ekonomi yang terjadi dewasa ini tidak terlepas dari sejarah pemikiran ekonomi yang terjadi dimasa lampau. Doktrin-doktrin ekonomi yang kita rasakan saat ini belum memberikan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai Negara berkembang banyak meniru kebijakan-kebijakan ekonomi Negara maju yang memiliki system social , politik dan budaya yang mungkin berbeda. Menurut santosa (2008) Pendidikan ekonomi di negara sedang berkembang berkiblat kepada negara maju dengan aliran Neoklasiknya. Aliran ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran Klasik yang dirintis oleh Adam Smith, dimana campur tangan negara boleh dikatakan tidak ada dalam urusan ekonomi, ditambah dengan penggunaan matematika dalam menganalisis ekonomi. Setiap teori hanya bermanfaat untuk periode, masalah, negara tertentu. Untuk itulah perlu dikaji pemikiran ekonomi alternative yang sesuai dan cocok dari karakteristik masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat pesisir yang mayoritas masih memegang adat istiadat dan kearifan local. Oleh Karena itu masyarakat pesisir sangat cocok menggunakan ekonomi kelembagaan karena melandaskan paradigma yang holistik, orientasi kesejahteraan manusia, multidisiplin, dan mengakomodir budaya dan kearifan lokal sebagai alternatif pengganti aliran ekonomi neoklasik dengan system pasar.

Pemikiran Ekonomi Kelembagaan

Dari kritikan yang dilontarkan, Veblen memberikan solusi dengan pemahaman ekonomi kelembagaan. Veblen berpandangan bahwa lingkungan fisik dan material dimana manusia berada sangat mempengaruhi kecenderungan manusia dan pandangannya mengenai dunia dan kehidupannya. Orang yang hidup dalam lingkungan yang kondusif untuk bekerja maka ia akan

cenderung memiliki etos kerja baik. Hubungan manusia dengan lingkungan akan mempengaruhi pola interaksi antar manusia dengan kekayaannya (*property*), sistem politik/hukum, falsafah hidup dan agama/keyakinannya. Interaksi manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya tersebut mendorong lahirnya ekonomi kelembagaan sebagai penopang tegaknya interaksi yang harmonis, dinamis, dan pasti. Veblen mendefinisikan kelembagaan sebagai "cara melakukan sesuatu, berfikir tentang sesuatu, dan mendistribusikan sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas kerja". Veblen membagi kelembagaan (institusional) menjadi dua: kelembagaan teknologi dan kelembagaan seremonial. 1. Kelembagaan teknologi meliputi mesin pengolah (*machine process*), penemuan, metoda produksi, teknologi dll. 2. Kelembagaan seremonial meliputi serangkaian hak-hak kepemilikan (*set of property rights*), struktur sosial dan ekonomi, kelembagaan keuangan, dll. Perubahan kelembagaan teknologi akan mendorong perubahan kelembagaan seremonial.

Aliran pemikiran ekonomi kelembagaan (institusional), muncul di daratan Amerika Serikat pada tahun 20-an dan aliran sejarah institusional dikembangkan di Jerman. Aliran pemikiran ekonomi dan aliran sejarah memiliki sedikit persamaan yaitu sama-sama menolak metode klasik. Tetapi aliran institusional menolak ide eksperimentasi sebagaimana yang dianut oleh aliran sejarah. Menurut Hasibuan (2003) inti pokok aliran ekonomi Kelembagaan adalah melihat ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah, dan hukum. Mereka merangkul hal tersebut dalam analisis ekonomi, namun demikian di antara mereka masih mempunyai ragam dan variasi pandangan. Pada garis besarnya mereka menentang pasar bebas atau persaingan bebas dengan semboyan *laissez-faire* dan motif laba maksimal. Sedangkan Chavance, (2009) mengatakan gagasan utama dari perspektif kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan social pada dasarnya telah dilembagakan sehingga ilmu ekonomi sebagai salah satu disiplin ilmu social harus memperhitungkan kelembagaan dan mempelajarinya sebagai aspek yang bersifat endogen bukan eksogen. North (1990) dalam studinya mengatakan "*Institutions are the underlying determinant of the long-run performance of economies.*" Lembaga menurut Rutherford (2001) lebih dari sekedar hambatan pada tindakan individu, tetapi juga perwujudan dari cara berpikir dan berperilaku yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dengan demikian lembaga membentuk pilihan (preferensi) dan nilai-nilai dari individu yang dibesarkan dalam suatu lingkungan tertentu.

Landreth dan Colander (1994) dalam Santosa (2008) membagi para tokoh ekonomi Aliran Kelembagaan dalam tiga golongan, yaitu tradisional, quasi dan neo. Aliran kelembagaan lama (Old Institution Economics / OIE) ditandai dengan lahirnya teori-teori yang di kemukakan oleh Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) sebagai bapak ekonomi kelembagaan. Kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Wesley Clair Mitchell (1874-1948). Mitchell menyempurnakan asumsi-asumsi yang ada dalam teori Veblen yang dianggapnya belum sempurna menguji asumsi-asumsi mana yang dapat membawa hasil yang memuaskan. Tulisannya yang terkenal adalah rentang siklus ekonomi (*business-cycles*), Pendekatannya cenderung pada evolusioner sebab-musabab yang kumulatif. Menurutnya setiap siklus ekonomi sifatnya unik, maka untuk membentuk model yang sifatnya umum relatif sukar karena setiap siklus mempunyai ciri-ciri persamaan. Persamaan ciri itu timbul karena adanya kekuatan-kekuatan ekonomi yang muncul dalam berbagai tahap siklus, seperti resesi, pemulihan (*recovery*), masa makmur (*prosperity*) dan depresi. Mitchell melihat adanya siklus karena suatu self generating process, yang diperolehnya dari himpunan data empiris. Kemudian dalam aliran ekonomi kelembagaan lama dikenal juga aliran Quasi Kelembagaan, aliran ini adalah mereka yang terpengaruh oleh pemikiran Veblen dan kawan-kawannya, akan tetapi sifatnya terlalu individualis dan iconoclastic dan corak pemikirannya berbeda dengan aliran kelembagaan yang baru. Para tokoh aliran ini antara lain Joseph Schumpeter, Gunnar Myrdal, dan John Kenneth Galbraith. Pemikiran Schumpeter bertumpu kepada ekonomi jangka panjang, yang terlihat dalam analisisnya baik mengenai terjadinya inovasi komoditi baru, maupun dalam menjelaskan terjadinya siklus ekonomi. Sedangkan Myrdal berpendapat bagi negara sedang berkembang supaya bisa maju diperlukan perencanaan pembangunan, yang meliputi segala aspek yaitu aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, kependudukan, maupun sektor lainnya. Alat analisis yang dapat dipergunakan dipengaruhi pemikiran Mitchell, yaitu sebab-musabab yang bersifat kumulatif.

Aliran Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economics* disingkat NIE) dimulai pada tahun-tahun 1930-an dengan ide dari penulis yang berbeda-beda. Menurut Yustika (2006), pada tahun-tahun terakhir ini terjadi kesamaan ide yang mereka usung itu kemudian dipertimbangkan menjadi satu payung yang bernama NIE. Secara garis besar, NIE sendiri merupakan upaya ‘perlawanan’ terhadap dan sekaligus pengembangan ide ekonomi Neoklasik, meskipun tetap saja dapat terpengaruh oleh ideologi dan politik yang pada pada masing-masing para pemikir. Santosa (2008) menilai Karakteristik dari para ahli NIE adalah selalu mencoba

menjelaskan pentingnya kelembagaan (emergency of institutions), seperti perusahaan atau negara, sebagai model referensi terhadap perilaku individu yang rasional untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan dalam interaksi manusia. Faktor penjelasnya adalah dari individu ke kelembagaan (from individuals of institutions), dengan menganggap individu sebagai apa adanya (given). Pendekatan ini kemudian dideskripsikan sebagai *methodological individualism*.

Aliran pemikiran dalam perspektif ekonomi kelembagaan diatas menunjukkan perbedaan focus dalam mendefinisikan lembaga. Perbedaan utama diantaranya kedua tradisi pemikiran itu adalah konsep tentang kebiasaan (perspektif) perspektif OIE menganggap kebiasaan sebagai hal yang penting dalam pembentukan lembaga dan menjamin keberlanjutannya karena kebiasaan membentuk sebuah dari kemampuan kognitif manusia. OIE cenderung menekankan definisi lembaga pada lembaga informal. Sedangkan NIE memberikan perhatian lebih pada lembaga formal. Termasuk dalam lembaga formal adalah berbagai jenis peraturan, hokum, dan perjanjian yang diatur oleh Negara. Sementara itu yang termasuk dalam lembaga informal adalah norma-norma dalam berperilaku, kesepakatan sosial, dan adat-istiadat. Namun dalam dunia nyata kedua jenis kelembagaan itu seringkali tumpang tindih sehingga walau dapat diberdakan keduanya sulit dipisahkan (Leach, et al, 1999; Mehta, et.al, 1999; Kingston dan Caballero, 2009).

Samuels dalam Prasad (2003) merangkum delapan aspek ekonomi kelembagaan sebagai berikut: 1. Menekankan proses evolusi melalui perkembangan institusi dan menolak teori neoklasik yang menekankan mekanisme penyesuaian otomatis melalui sistem harga 2. Menolak pandangan neoklasik bahwa efisiensi akan tercapai dengan sistem pasar. 3. Teknologi bersifat dinamis 4. Alokasi sumber daya tergantung struktur kelembagaan. 5. Teori kelembagaan tidak hanya memperhatikan harga tetapi juga nilai-nilai yang terkandung dalam struktur dan perilaku sosial. 6. Menolak pandangan neoklasik yang hanya memaksimalkan kepuasan individu tanpa melihat norma-norma yang ada dalam masyarakat. 7. Lebih berorientasi "Pluralistik atau demokratik". Sementara neoklasik tidak memperhatikan ketimpangan dan kejahatan sosial sebagai hasil dari struktur kelembagaan yang ada. 8. Memandang perekonomian dengan cara holistik dan menjelaskan kegiatan ekonomi dengan cara multi-disiplin. Menurut Yustika (2008) Pendekatan ekonomi kelembagaan menggunakan metode kualitatif yang dibangun dari tiga

premis penting yaitu: partikular, subyektif dan, nonprediktif. Partikular dimaknai sebagai heterogenitas karakteristik dalam masyarakat. Artinya setiap fenomena sosial selalu spesifik merujuk pada kondisi sosial tertentu dan berbeda dengan kondisi sosial di daerah lain. Subyektif disini sesungguhnya peneliti mengangkat realitas atau fenomena sosial dan lebih mendekatkan diri pada situasi dan kondisi yang ada pada sumber data, dengan berusaha menempatkan diri serta berpikir dari sudut pandang “orang dalam” dalam antropologi disebut dengan emic. Nonprediktif ialah bahwa dalam paradigma penelitian kualitatif sama sekali tidak masuk ke wilayah prediksi kedepan, tetapi yang ditekankan disini ialah bagaimana pemaknaan, konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi atas sesuatu, fokusnya adalah menjelaskan secara utuh proses dibalik sebuah fenomena.

Tinjauan Empiris dengan Masyarakat Pesisir

Banyak kajian-kajian yang dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi dewasa ini untuk menenkan pentingnya peran faktor penguatan kelembagaan dan kearifan lokal dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Penelitian Yustika (2005) yang meneliti bagaimana penerapan ekonomi Kelembagaan pada masalah industri pergulaan di Indonesia. Dalam penelitiannya biaya transaksi petani tebu menyumbang sekitar 42 persen dari biaya total dan sisanya (58 persen) berupa biaya produksi. Selanjutnya Yustika berpendapat kemunduran industri gula nasional disebabkan oleh inefisiensi kelembagaan (institutional inefficient), baik pada level kebijakan kelembagaan (institutional environment) maupun kesepakatan kelembagaan (institutional arrangement). Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Santosa (1985) dalam penelitiannya mengamati pengaruh budaya (culture) terhadap pembangunan, khususnya pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gotong royong terpengaruh oleh sistem religi yang dianut dalam masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bersifat tradisional, bekerja sama dalam mengerjakan pembangunan desa baik melalui tenaga maupun dalam bentuk uang..

Masyarakat pesisir pada umumnya adalah bermata pencarian sebagai nelayan dan memiliki budaya kebersamaan yang tinggi. Masyarakat pesisir mempunyai sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang khas/unik. Sifat ini sangat erat kaitannya dengan sifat usaha di bidang

perikanan itu sendiri. Oleh karena itu karakteristik dari setiap daerah sangat berbeda yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, musim, pasar dan pola penangkapan ikan yang dilakukan pada masyarakat tersebut. Kelembagaan adat dalam masyarakat pesisir menjadi sangat penting dalam pengkesploitasian sumber daya yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (2010) mengatakan Kapasitas budaya (Masyarakat hukum adat) sangat penting untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan dan penangkapan dari potensi sumber daya yang ada dan dapat dimanajementi dengan kekayaan kearifan. Kearifan penting dimanfaatkan mengingat secara global kondisi perikanan dunia sebagian besar dieksploitasi berlebih.

Sistem ekonomi pasar menyebabkan eksploitasi sumber daya yang berlebihan sehingga kelestarian sumber daya menjadi semakin langka (rusak). Penelitian yang dilakukan Carlssona (2005) menyimpulkan bahwa ketika ekonom melihat organisasi ekonomi secara keseluruhan mereka kemudian mengajukan banyak pertanyaan tentang efisiensi. Namun, selama beberapa dekade, ekonom tidak bertanya tentang biaya dan manfaat dari menurunnya atau kerusakan lingkungan (modal alam) wilayah pesisir laut akibat kegiatan proses produksi. Hal ini juga dapat mengakibatkan suatu kondisi di mana kegiatan produktif melebihi kemampuan ekosistem untuk mendukung produksi ekonomi. Ketika batas ekologi terlampaui dari waktu ke waktu maka akan menimbulkan masalah sosial yang pada akhirnya dapat terjadi kehilangan sumber daya perikanan yang ada. Spektrum yang luas dari informasi tentang proses ekosistem, kesehatan, manfaat dan nilai-nilai ekonomi pesisir sangat penting dikelola dengan baik dan benar dalam mempertahankan modal alam di wilayah pesisir untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Arifin (2004) menyatakan co-management memadukan antara unsur masyarakat pengguna (kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dll) dan pemerintah yang menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasi pada satu pihak dapat dieliminasi. Dalam jangka panjang, pelaksanaan co-management ini diyakini akan memberikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik yaitu: 1) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya pesisir dan laut dalam menunjang kehidupan, 2) meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan secara terpadu, 3) meningkatkan

pendapatan masyarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan

Implikasi kajian yang dilakukan Purwanti (2010) tentang model ekonomi rumah tangga nelayan skala kecil dalam mencapai ketahanan pangan menyimpulkan bahwa pembinaan nelayan tentang penanganan pasca tangkap dan perbaikan mutu ikan yang dapat meningkatkan harga ikan berdampak positif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan rumah tangga nelayan kecil, terutama pada saat terjadinya kenaikan biaya operasional fishing dan kenaikan harga bahan pokok. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan pemerintah dengan memberikan pelatihan nelayan untuk meningkatkan kualitas hasil tangkap ikan, penguatan dan penataan kelembagaan masyarakat nelayan dalam kegiatan pemasaran.

Witarsa (2015) Keberhasilan pengelolaan dengan model co-management ini sangat dipengaruhi oleh kemauan pemerintah untuk mendesentralisasikan tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan kepada nelayan dan stakeholder lainnya. Oleh karena co-management membutuhkan dukungan secara legal maupun finansial seperti formulasi kebijakan yang mendukung ke arah Co-management, mengizinkan dan mendukung nelayan dan masyarakat pesisir untuk mengelola dan melakukan restrukturisasi peran para pelaku pengelolaan perikanan.

Bennett et.al (2001) mengkaji bagaimana kegagalan kelembagaan yang di sebabkan oleh konflik perebutan sumber daya perikanan dengan studi kasus di Ghana, Banglades dan Karabia. Hasil kesimpulan dari kajian menunjukkan bahwa penguatan manajemen kelembagaan di tingkat local berhasil menurunkan konflik secara jangka pendek, dan untuk jangka panjang diperlukan penguatan kelembagaan ditingkat pusat dengan aturan dan penegakan hukum, pasar yang stabil dan politik yang jelas. Untuk di tingkat local system ko-manajemen berhasil menurunkan tingkat biaya transaksi yang rendah , kemudahan pinjaman dan konflik perebutan sumber daya perikanan dapat ditekan.

Juniarta (2013) Terbentuknya struktur, lembaga lokal dan sistem yang mengakomodir, antara semua aspek dan sistem kehidupan, baik di wilayah pesisir dan laut maupun aspek pendukung yang terkait, termasuk aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu membangun struktur sosial dan

ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan adanya peran vital bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga dapat dilakukan dengan langkah-langkah strategi sebagai berikut : a. Membentuk lembaga lokal. b. Pengembangan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. c. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi.

Selain Sumberdaya Manusia sebagai penggerak roda ekonomi, Keberhasilan pengembangan ekonomi suatu wilayah juga dipengaruhi oleh peranan lembaga ekonomi sebagai mitra masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usahanya, baik dari lembaga perbankan, koperasi, BUMN atau perusahaan daerah. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan melalui kegiatan penelitian ini, fasilitas bantuan permodalan, peralatan dan manajemen bagi masyarakat pesisir di Pulau Laut Kepulauan dan Pulau Laut Barat relatif terbatas. (Bachri et.al, 2015)

Kesimpulan dan Diskusi

Ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pilihan dalam situasi kelangkaan sumberdaya. Akibat kelangkaan ini akan terbentuk harga dipasar. Namun masalahnya secara nyata banyak pasar yang tidak sempurna dan akibatnya harga tidak mencerminkan kelangkaan nyata. Hal ini sering terjadi pada produk-produk perikanan yang sangat bergantung kepada lingkungan sumber dayanya. Ekonomi neoklasik lebih mengedepankan keuntungan maksimum dengan berlandaskan pada kekuatan pasar dimana aturan atau campur tangan pemerintah dapat dikatakan sebagai distorsi dalam system pasar. Dampak dari pandangan ini akan terjadi eksploitasi yang berlebihan baik dari segi sumber daya maupun manusianya akibat untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi. Begitu juga nelayan yang juga dikatakan sebagai pengusaha disektor hulu tidak mendapatkan pendapatan yang sama dengan pengusaha yang langsung menjual ke konsumen, sehingga jurang disparitas pendapatan nelayan dengan pengepul sangat tinggi.

Pandangan ekonomi kelembagaan mungkin bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan diatas dengan pendekatannya ilmu yang bersifat holistik. Berbagai Pendekatan etnografis, *grounded research*, historis, interdisiplin, multidisiplin, transdisiplin, bahkan jenis

metode penelitian kualitatif lainnya sah-sah saja untuk dipakai (santosa, 2008). Pengembangan kelembagaan dalam ekonomi masyarakat nelayan sangat diperlukan sebagai rekonstruksi ulang dalam penguasaan dan akses sumber daya produktif di bidang perikanan. Khususnya dalam penguasaan pasar, pengolahan produk-produk hasil perikanan dengan penguatan teknologi dan keberlangsungan ekosistem untuk generasi dimasa yang akan datang. Lembaga-lembaga formal maupun informal harus saling bersinergi dan menguatkan satu sama lain agar pencapaian tujuan sesuai dengan yang diharapkan bersama.

Model kelembagaan untuk merestrukturisasikan perikanan pada masyarakat pesisir tidak sebatas pada koperasi. Factor keragaman wilayah geografis, budaya dan kearifan local pada dasarnya merupakan potensi yang harus berkembang, sesuai dengan karakteristik dan kebhinekaan Indonesia. Model-model sederhana seperti kelompok usaha perikanan hingga ke korporasi nelayan (corpoarate community) dapat menjadi cara untuk memperkuat posisi tawar (bargaining position) nelayan melalui peningkatan kapabilitas SDM, penggunaan teknologi yang efisien dan akses yang lebih baik ke sumber daya. Beberapa stakeholder yang sangat diperlukan perannya dalam kelembagaan perikanan ini adalah dari internal masyarakat seperti koperasi, BUMDes, paguyuban, pemerintah desa, lembaga adat, dan sebagainya. Sedangkan untuk dari luar seperti pemerintah kabupaten/ kota atau provinsi maupun pusat, lembaga perguruan tinggi local maupun internasional, perbankan, asosiasi pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk itu diperlukan kajian yang mendalam dengan berbagai lintas bidang ilmu dan pemetaan yang lebih komprehensif untuk menemukan model-model kelembagaan perikanan pada masyarakat pesisir di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, sebagai modal sosial yang akan sangat berperan dalam pembangunan sector perikanan dan perdesaan dimasa mendatang. Dampaknya tentu akan memberikan rasa percaya diri dan menumbuhkan produktivas kerja bagi nelayan, dan Akses yang semakin baik terhadap sumberdaya (access to resources), seperti pasar, infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan produktif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Alim Bachri, et.al. (2015).” Kajian Ekonomi Masyarakat pesisir Kabupaten Kotabaru”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol 1, No 1, Maret 2015, hal 95 - 103
- Arifin, Rudyanto, (2004). *Kerangka Kerjasama dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut*. Jakarta: Bappenas
- Budi Santosa, Purbayu, (1985). *Peranan Gotong Royong pada Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Karanganyar)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Tidak Diterbitkan.
- Budi Santosa, Purbayu, (2008) ”Relevansi dan Aplikasi Aliran Kelembagaan”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, , Vol. 9 , No.1. Juni 2008.
- Carlssona, Lars & Berkesb Fikret. (2005) “Comanagement: concepts and methodological implications”. *Journal of Environmental Management*, vol.75, 65–76
- Chavance, Bernard , (2009). *Institutional economics Routledge Frontier of Political Economy* . UK, Routledge publisher.
- Deliarnov, (2016). *Perkembangan pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- E Bennett, et.al., (2001) *Towards a better understanding of conflict management in tropical fisheries: evidence from Ghana, Bangladesh and the Caribbean*, Centre for the Economics and Management of Aquatic Resources (CEMARE), Department of Economics, University of Portsmouth, CEMARE Research Paper 159.
- Hagi Primadasa Juniarta et.al., (2013). “Kajian Profil Kearifan local masyarakat pesisir pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur”, *Jurnal ECSOFiM* Vol. 1 No. 1, 2013
- Hasibuan, Nurimansjah, (2003). *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Kingston, Christopher, Gonzalo Caballero, (2009). “ Comparing Theories of Institutional Change.” *Journal of Institutional Economics*. Vol. 5, Issue 02, pp 151-180.

- Leach, Melissa, Robin Mearns and Ian Scoones, (1999). “ environmental entitlements; dynamics and instutions in Community –Based Natural Resource Management.: *World Development* . Vol. 27, No.2 , pp. 225-247
- Mehta, LM. Leach, P. Newell, I. Scoones, K. Sivaramakrishnan, S. Way, (1999). “Exploring Understandings of Instutions and uncerternainty; New Directions in Natural Resource Management”. *IDS Discussion Paper* 372. Brighton. Instate of Development Studies.
- North, Douglas C. (1990). *Institutions, Institutional Chanfe and economic Performance* , Cambridge University Press.
- Prasad, B.C, (2003), “Institutional Economics And Economic Development: The Theory Of Property Rights, Economic Development, Good Governance And Environment”, *International Journal Of Social Economics* Vol.30 No.6.pp.741-762
- Pudji Purwanti, (2010). *Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan skala Kecil*. Malang, UB Press.
- Robert B. Ekelund Jr, Robert F. Hebert , (1997). *A history of economic theory and method fourth edition* , New York: MCGRAW HILL
- Skousen Mark, (2001). *Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern*. Terjemahan Tri Wibowo BS. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulaiman, . (2010). *Konsep Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh Pada Masa Otonomi Daerah*. Makalah Lokakarya 8 Tahun Otonomi Daerah. Malang: Universitas Brawijaya.
- Theodor W Adorno, (1997). *Prisms* . Translated from the German by Samuel and Shierry Weber, Ninth printng, Cambridge: MIT Press.
- Thorstein Veblen , (2007) *.The Theory of the Leisure Class* , edited with Martha Banta , Great Britain : Oxford University Press.
- Witarsa, (2015). *Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Co-Managemet Sumber Daya perikanan Di Kabupaten Pontianak*, Prosiding Seminar Nasional 9 Mei 2015
- Yustika, Ahmad Erani, (2006). *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang: Bayu Media.